

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan desentralisasi, membuat pemerintah daerah wajib sanggup melaksanakan bermacam kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, bersamaan dengan pelayanan yang wajib disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut wajib sanggup membagikan pelayanan yang bermutu dalam makna lebih berorientasi kepada aspirasi penduduk lebih efektif, efisien, serta bertanggungjawab. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menerangkan kalau pelayanan ialah tugas utama dari wujud aparatur selaku abdi negeri serta abdi masyarakat.

Tugas aparatur selaku pelayan wajib lebih mendahulukan kepentingan universal, memudahkan urusan publik, mempersingkat waktu proses penerapan urusan politik serta berikan kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai peranan utama membagikan bermacam pelayanan yang dibutuhkan oleh publik guna melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Wujud pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik merupakan dalam wujud pengaturan maupun pelayanan-pelayanan lain, buat penuhi kebutuhan publik dalam bidang pembelajaran kesehatan, infrastruktur (jalur serta jembatan, penerangan, air serta keperluan publik yang lain). Pelayanan publik

ialah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat universal yang jadi penduduk negeri Pemerintah selaku lembaga birokrasi memiliki guna untuk membagikan pelayanan kepada publik sementara itu publik selaku pihak yang berikan mandat kepada pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan ialah untuk melindungi sesuatu sistem kedisiplinan dan bertanggungjawab membagikan pelayanan kepada publik serta bukan untuk dirinya sendiri. Anggapan Tanggapan jika pemerintah yang baik merupakan pemerintahan yang dekat dengan rakyat, terus menjadi dekat pemerintah dengan rakyat terus menjadi baik pula pelayanan yang diberikannya begitu pula pada bidang pendidikan.

Prasarana gedung serta perlatan belajar ialah benda publik yang keberadaannya wajib dialami oleh segala susunan publik hingga selaku konsekuensinya hak kemampuan serta wewenang pengadaan prasarana biasanya dicoba oleh pemerintah serta diharapkan tiap daerah sanggup meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada warga yang lebih peka terhadap kebutuhan publik setempat. Salah satunya pada bidang pendidikan. Pembangunan Prasarana diwilayah provinsi memiliki akibat langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi publik secara berkesinambungan. Prasarana yang dibentuk mesti sanggup dimanfaatkan hingga masa yang panjang, untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“Metode Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

Bagaimana metode pemeliharaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami metode pemeliharaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Untuk tambahan pengetahuan bagi penulis dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya tentang metode pemeliharaan aset tetap
2. Penulis bisa merasakan lingkungan kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk menambah wawasan terhadap metode pemeliharaan aset tetap

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Mempublikasikan Diploma III Keuangan yang berkualitas sertasiap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.
2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui

pengalaman kerja magang, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Dapat membantu dan mempermudah aktivitas pada instansi tersebut
2. Membantu mengembangkan, meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi

1.5 Metode Magang

1.6.1 Study Keperpustakaan

Dilakukan dengan mencatat data yang relevan dengan obyek penelitian. Data dan informasi tersebut bisa didapatkan dari buku-buku, karyailmiah, dan sumber lainnya.

1.6.2 Study Lapangan

1. Data Primer

Data yang diperoleh hasil diskusi bersama pegawai dan pejabat yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara pengambilan dokumen tertulis maupun elektronik di instansi terkait untuk kelengkapan data.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.52, Jati Baru, Kec Padang Timur Sumatera Barat Telp. (0751) 31513. Sedangkan waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai pada Januari sampai Maret.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan laporan ini sistematika penulisan laporan di bagi dalam 5 Bab, dimana masing-masing Bab membahas :

Bab I: Pendahuluan

Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, landasan teori dan sistematika penulisan laporan.

Bab II: Landasan Teori

Membahas tentang landasan teori dari Metode Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari pengertian dan definisi tentang aset tetap.

Bab III : Gambaran Umum Instansi / Profil Lembaga dan Pembahasan

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berada aktivitas usaha, struktur organisasi, visi dan misi, dan ruang lingkup Metode Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV : Pembahasan

Merupakan isi pokok dari Metode Pemeliharaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Bab V : Penutup

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi kelangsungan aktivitas instansi.

